



**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023**

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 2

Jalan Jenderal Sudirman No. 199, Kode Pos 57521

Telp. (0271) 593068, Fax. 593335

Website : www.dpkukm.sukoharjokab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT, atas karunia Nya penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah(Renja OPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 ini dapat diselesaikan pada waktunya. Rencana Kerja ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sebagai acuan/pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023.

Disadari sepenuhnya pula bahwa dalam penyusunan Renja ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan maupun kualitas materi yang sangat jauh dari harapan. Oleh sebab itu saran masukan yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan demi penyempurnaan Renja ini.

Demikian Renja ini di buat semoga dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo, pemerintah dan lapisan masyarakat di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Sukoharjo, 29 Juli 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO**



IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum
Pembina Utama Tingkat I (IVb)

NIP. 19780304 199703 1 001



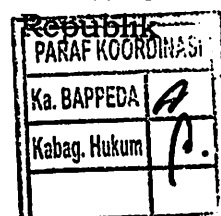
**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023**

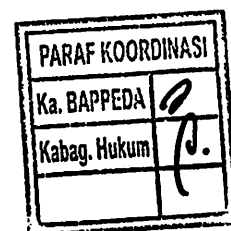
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 174);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023.

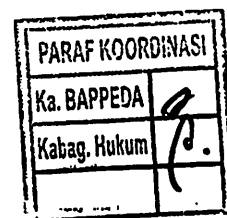
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

BAB II

SISTEMATIKA DAN FUNGSI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
- c. Bab III : Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Bab V : Penutup.

Pasal 5

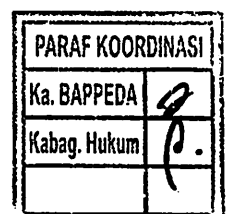
Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.



BAB IV
PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 7

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - k. Dinas Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup;
 - m. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - r. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
 - s. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 - t. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 - u. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
 - v. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
 - w. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - x. Badan Keuangan Daerah;
 - y. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - bb. Kecamatan Weru;
 - cc. Kecamatan Bulu;
 - dd. Kecamatan Tawang Sari;
 - ee. Kecamatan Sukoharjo;
 - ff. Kecamatan Nguter;
 - gg. Kecamatan Bendosari;
 - hh. Kecamatan Polokarto;
 - ii. Kecamatan Mojolaban;
 - jj. Kecamatan Grogol;
 - kk. Kecamatan Baki;
 - ll. Kecamatan Gatak; dan
 - mm. Kecamatan Kartasura.



- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf mm tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, Lampiran XXI, Lampiran XXII, Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, Lampiran XXVII, Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, Lampiran XXXIII, Lampiran XXXIV, Lampiran XXXV, Lampiran XXXVI, Lampiran XXXVII, Lampiran XXXVIII, Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*

Etik Suryani
ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

Widodo

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI	
Ka. BAPPEDA	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023

RENCANA KERJA
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
II. HASIL EVALUASI RENJA TAHUN 2021	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	15
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	16
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	17
III. TUJUAN, SASARAN, RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022	18
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	18
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DisdagkopUKM Kab. Sukoharjo.....	19
3.3. Rencana Program dan Kegiatan.....	20
IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023	26
4.1. Tujuan dan Sasaran Renja DisdagkopUKM Kab. Sukoharjo	27
4.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023	20
V. PENUTUP	30
DATA PENDUKUNG	
SELESAI	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 mengacu pada perencanaan Nasional dan Provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan baik dari tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi riil yang dialami oleh Kabupaten Sukoharjo dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2021 – 2026 Kabupaten Sukoharjo sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dibidang Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2023.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo disusun berdasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMD) Kabupaten Sukoharjo 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo serta rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan visi jangka menengah daerah.

❖ **Visi dan Misi Jangka Menengah Daerah**

Adapun visi dan misi jangka menengah sebagai tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 adalah :

➤ **Visi**

“ Terwujudnya Masyarakat Sukoharjo Yang Lebih Makmur”

Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Visi Pembangunan Kabupaten Sukoharjo tersebut harus dapat diukur keberhasilannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

➤ **Misi**

Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi yang pada hakekatnya diarahkan untuk mendukung terwujudnya visi lima tahun kedepan, dengan tujuan agar tercipta kesinambungan arah pembangunan yang diinginkan. Misi yang dirumuskan untuk mengemban pencapaian visi selama lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas;
3. **Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi;**
4. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan;
5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Tugas dan fungsi DisdagkopUKM Kabupaten Sukoharjo terkait dengan misi III (**ketiga**) pembangunan jangka menengah Kabupaten Sukoharjo yaitu **“Memperkuat Perekonomian Rakyat Yang Berdaya Saing Tinggi”**. Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DisdagkopUKM dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Dengan sasaran untuk meningkatkan pertumbuhan produktivitas. Dan ditetapkan Tujuan DisdagkopUKM Kabupaten Sukoharjo (Perangkat Daerah) adalah Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktivitas Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi arah kebijakan RPJMD 2021-2026, secara khusus Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo terpilih 2021-2026 membuat Program Unggulan yang harus diimplementasikan/diwujudkan. Sementara itu program unggulan untuk mendukung visi dan misi tersebut yakni :

- a. Bantuan sarana produksi bagi UMKM;
- b. Fasilitasi akses online pemasaran pada setiap pasar;
- c. Gerakan Beli Produk Sukoharjo;
- d. Jaringan Kemitraan Pemasaran dengan swalayan;
- e. Memperluas jaringan Online Toko PAS (Produk Asli Sukoharjo);
- f. Online Market Place UMKM;
- g. Pelatihan E-commerce bagi UMKM.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2007-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 - 2021;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

1. Sebagai acuan dalam mengevaluasi kegiatan/program pada tahun 2022.
2. Sebagai perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2023.

1.3.2. Tujuan

1. Memberikan landasan kebijakan bagi pelaksana kegiatan.
2. Memperoleh kemudahan dalam menentukan skala prioritas.
3. Memperoleh kemudahan pemahaman dalam menyusun perencanaan anggaran.
4. Untuk menetapkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Sementara Pembangunan tahun 2023.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023

1.1. Latar Belakang

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

1.3. Maksud dan Tujuan

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja DINAS Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

Bab ini memuat terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Lalu

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2021 dan realisasi Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan indikator yang sudah ditentukan

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Bagian ini menguraikan tingkat kinerja pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, permasalahan dan hambatan, dampak terhadap visi/misi, tantangan dan peluang, dan rekomendasi serta catatan strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2021

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bagian ini menguraikan proses perbandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2022

Bab ini menguraikan tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang direncanakan

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

3.3. Program dan Kegiatan

Bagian ini menguraikan garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Tahun 2023

4.1. Tujuan

4.2. Sasaran

Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021

Rencana Kerja (Renja) suatu OPD adalah Penjabaran Perencanaan tahunan dari Rencana Strategis OPD tersebut. Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut :

- a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki;
- c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
- d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Penyusunan Renja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2022;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

❖ **Evaluasi Program Tahun 2021**

Anggaran Tahun 2021 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp. 32.678.941.000,- (termasuk perubahan) dengan 13 program, 23 kegiatan dan 54 sub kegiatan, Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 21.060.906.207,- atau 64,45 %.

Hasilnya evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 adalah seperti table berikut pada lampiran 1.

Pencapaian Tahun Anggaran 2021

Pencapaian Kinerja Belanja Langsung tahun anggaran 2021 dengan anggaran sebesar Rp. 21.060.906.207,- terbagi dalam 13 program, 23 kegiatan dan 54 sub kegiatan, pencapaian kinerja mencapai 64,45 %.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut:

a. Perdagangan :

1. Distribusi barang dan jasa belum lancar
2. Omzet penjualan masih rendah
3. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang sudah dibangun
4. Belum meratanya ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan
5. Peluang ekspor masih luas tetapi belum digunakan secara maksimal

b. Koperasi dan UMKM

1. SDM Pengelola Koperasi dan UMKM masih terbatas, belum maksimal dalam hal pemahaman dan manajemen tentang perkoperasian dan UMKM

2. Terbatasnya permodalan Koperasi dan UMKM sehingga perkembangannya sangat lambat, dan kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan
3. Kualitas produksi UMKM belum maksimal sehingga jangkauan pemasaran produk UMKM masih terbatas
4. Kurangnya kesadaran untuk mengikuti Bimbingan Teknis ataupun pelatihan guna meningkatkan SDM
5. Masih terbatasnya kesempatan mengikuti pameran di tingkat Regional Maupun Nasional, belum adanya kesadaran bermitra antar UMKM dan perusahaan besar
6. Koperasi belum memahami secara jelas aturan tentang penilaian kesehatan, masih kurangnya sosialisasi tentang kesehatan koperasi.
7. Terbatasnya kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun bintek guna meningkatkan SDM Aparatur padahal aturan dan regulasi teknis selalu berubah/ berganti

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo melaksanakan beberapa kegiatan guna mengatasi permasalahan sebagai berikut :

1. Meningkatkan arus distribusi barang dan jasa dengan memfasilitasi penataan basis produksi dan distribusi
2. Memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal dan mengembangkan usaha yang kompetitif sehingga mampu bersaing dipasaran
3. Meningkatkan pelayanan prima dengan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia
4. Meningkatkan sumber daya daerah dengan pembangunan sarana dan prasarana perdagangan
5. Mengembangkan jenis komoditi unggulan dan andalan daerah, jumlah pelaku usaha dan pasarnya dalam rangka meningkatkan ekspor non migas
6. Melaksanakan kegiatan Bintek, pelatihan, workshop di bidang Kelembagaan Koperasi, Pengembangan Koperasi maupun di bidang Pemasaran produk guna meningkatkan SDM baik bagi pengelola, maupun pengurus Koperasi dan UMKM

7. Mendorong meningkatnya modal sendiri melalui penambahan simpanan wajib tiap tahun dan modal kerja melalui fasilitasi permodalan dengan pihak ketiga (Perbankan dan LPDB)
8. Meningkatkan manajemen kelembagaan koperasi dan UMKM menuju koperasi dan UMKM yang sehat
9. Meningkatkan kualitas dengan kemampuan SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM dengan difasiltasi melalui diklat pusat Propinsi maupun Kabupaten.
10. Mengikuti pelatihan/ Bintek Aparatur guna meningkatkan SDM

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan dokumen yang akan menghasilkan perencanaan Perangkat Daerah yang berupa RKA, DPA dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai capaian tersebut tahun 2020 telah mencapai target yaitu melaksanakan koordinasi perencanaan pembangunan bidang perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
3. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi masyarakat dan revitalisasi pembangunan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi rakyat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha kecil dan Menengah

1. Indikator Tujuan

Indikator Tujuan dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM sesuai dengan urusan yang diampu pada RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil pada awal RPJMD adalah sebesar 2,60 %, diharapkan pada akhir RPJMD meningkat menjadi sebesar 3,70%;
- b. Pertumbuhan Wira Usaha Baru pada awal RPJMD adalah sebesar 10 %, diharapkan pada akhir RPJMD meningkat menjadi sebesar 16 %;
- c. Pertumbuhan Usaha Mikro ke Usaha Kecil pada awal RPJMD adalah sebesar -35 %, diharapkan pada akhir RPJMD meningkat menjadi sebesar 5,6 %;

2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran dari Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- a. Presentase koperasi aktif pada awal renstra adalah 81,67%, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 84,5 %;
- b. Presentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dinilai Kesehatannya untuk Koperasi pada awal renstra adalah 11,74%, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 30 %;
- c. Presentase Usaha Mikro dan Kecil pada awal renstra adalah 99,57%, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 99,64 %;
- d. Presentase Wirausaha Baru yang Mempunyai NIB pada awal renstra adalah 1459,81%, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 5,51%;
- e. Presentase Kenaikan Nilai Ekspor Non-Migas pada awal renstra adalah -16,05%, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 0,50%;
- f. Presentase Peredaran Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Standart pada awal renstra adalah 2,00 %, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 1,40%;

- g. Presentase Pasar Tertib Ukur pada awal renstra adalah 7,6 %, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 53,80%;
- h. Presentase Pasar Dalam Kondisi Baik pada awal renstra adalah 76,9%, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 96,1%;
- i. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada awal renstra adalah 51,17%, diharapkan pada akhir renstra meningkat menjadi sebesar 75 %;

❖ **Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

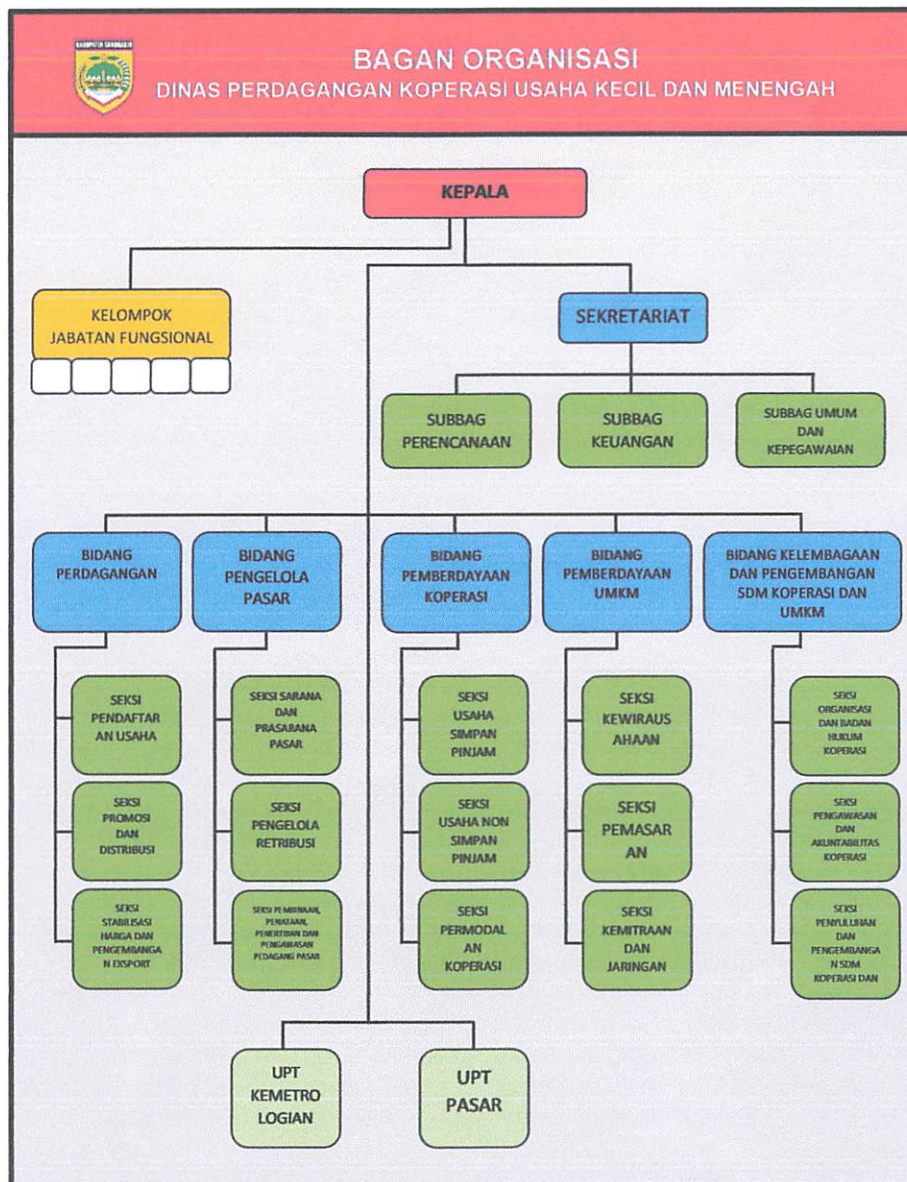
Struktur Organisasi merupakan sesuatu yang sangat penting karena merupakan sarana yang dapat menjelaskan tentang bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Perencanaan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perdagangan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pendaftaran Usaha.
 - b. Seksi Promosi dan Distribusi.
 - c. Seksi Stabilitas Harga dan Pengembangan Eksport.
4. Bidang Pengelola Pasar, terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar.
 - b. Seksi Pengelola Retribusi.
 - c. Seksi Pembinaan, Penataan, Penertiban dan Pengawasan Pedagang Pasar.
5. Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri atas:
 - a. Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi.
 - b. Seksi Usaha Non Simpan Pinjam Koperasi.

- c. Seksi Permodalan Koperasi.
- 6. Bidang Pemberdayaan UMKM terdiri atas:
 - a. Seksi Kewirausahaan.
 - b. Seksi Pemasaran.
 - c. Seksi Kemitraan dan Jaringan.
- 7. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM:
 - a. Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi.
 - b. Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi.
 - c. Seksi Penyuluhan dan Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM.
- 8. UPTD
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Potret kondisi atau gambaran umum pelayanan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo yang telah diuraikan sebelumnya, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Sukoharjo. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan

agenda aktual kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan.

Penentuan isu-isu strategis dilaksanakan dengan identifikasi isu-isu strategis. Identifikasi isu-isu strategis adalah merupakan salah satu bagian dalam perencanaan strategis yang harus dilakukan untuk memperoleh arahan strategis pada proses perencanaan pembangunan.

Adapun isu-isu strategis tersebut adalah

1. Permasalahan pembangunan bidang perdagangan yang perlu mendapatkan perhatian adalah belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan Pasar Tradisional yang sudah dibangun dengan baik dan belum meratanya ketersediaan prasarana perdagangan pasar pada tingkat kecamatan permasalahan yang lain belum tersediannya data dan informasi komodite perdagangan yang keluar masuk daerah
2. Perlunya peningkatan kualitas SDM KUMKM untuk menghadapi perkembangan iptek dan teknologi informasi
3. Belum terjaganya kualitas, kuantitas dan konektivitas produk KUMKM karena keterbatasan permodalan, sarana produksi dan rendahnya pemanfaatan teknologi
4. Kurangnya kesadaran bermitra antar UMKM dengan perusahaan besar
5. Kesempatan untuk mengikuti pelatihan maupun bimtek bagi aparatur masih kurang, padahal aturan regulasi teknis selalu berubah atau berganti

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Guna menghasilkan suatu rencana kerja OPD yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu telaahan (*review*) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

Berdasarkan pada isu strategis dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2021 dan RKPD Tahun Berjalan 2022, agar sasaran pembangunan tahun 2023 lebih fokus, maka perlu disusun prioritas pembangunan Kabupaten Sukoharjo, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya saing UMKM;
2. Penguatan ekonomi berbasis kerakyatan
3. Peningkatan pembangunan fasilitas perdagangan
4. Mengembangkan wirausaha baru diarahkan pada usaha kreatif bernilai tinggi
5. Pelatihan Kewirausahaan
6. Meningkatkan daya dukung infrastruktur terhadap kemajuan perekonomian

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan perumusan kebijakan Bupati di bidang Perdagangan Koperasi UKM berdasarkan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di bidang Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam menjaring usulan dari para pemangku kepentingan tersebut, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengadakan beberapa mekanisme antara lain dengan melalui musrenbang mulai dari tingkat Desa sampai Kabupaten. Usulan-usulan tersebut ditampung dan ditelaah manfaatnya dan dianalisis berdasarkan kebutuhan masyarakat untuk dituangkan menjadi RKPD dan Renja Organisasi Perangkat Daerah terkait.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan dimulai dengan mengenali potensi dan kebutuhan dari masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko. Langkah selanjutnya adalah mencari cara dan upaya untuk mewujudkannya. Dengan demikian kegiatan pembangunan yang menyangkut perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi seharusnya beranjak dari keinginan dan kemampuan masyarakat penerima manfaat dan penanggung resiko itu sendiri.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan pemilihan prioritas yang tajam dan terpercaya merupakan sarana untuk mengejawantahkan apa yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 - 2026.

Pendanaan (anggaran daerah) merupakan instrumen atau unsur manajemen utama dalam perencanaan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

Sejalan dengan otonomi dan desentralisasi bagi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut untuk dilakukan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan public (public oriented). Hal ini tidak hanya terlihat dari besarnya porsi alokasi namun juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dirasakan perlu dioptimalkan. Karena pada umumnya unit kerja belum menjalankan fungsi dan peran secara optimal dan efisien. Terjadinya penganggaran belanja yang kurang tepat merupakan fenomena umum yang digunakan dalam penentuan alokasi dana dengan pendekatan incrementalisme atau line-item budget (trend atau pos anggaran yang tersedia) yang sebetulnya pos tersebut secara riil tidak dibutuhkan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis secara akurat tentang alokasi anggaran bagi masing-masing Perangkat Daerah, dimana

setiap kegiatan pengalokasian dana (belanja) yang harus berbasis kinerja (capaian), biarpun belum sepenuhnya secara komprehensif dan representative. Kita lakukan hal tersebut dikarenakan secara ideal membutuhkan adanya variable/indikator yang dapat mewakili semua bidang pembangunan. Indikator/variabel yang dibutuhkan antara lain: Indeks pembangunan (ekonomi/sosial) sesuai dengan aktivitas masing-masing Perangkat Daerah, kondisi pembangunan, efektivitas terhadap capaian hasil Ranja Perangkat Daerah, tingkat output yang dihasilkan Perangkat Daerah, anggaran belanja tahun sebelumnya, indeks belanja publik dan belanja aparatur.

Penerapan atau implementasi anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan optimal juga diperlukan kesepahaman pola pikir, membangun komitmen yang sinergis dari segenap unsur eksekutif, legislatif dan stakeholder pembangunan.

Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja DisdagkopUKM disusun selain berpedoman pada Renstra DisdagkopUKM, RPJMD Kabupaten Sukoharjo, RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada Renstra Kementerian/ Lembaga, agar selaras dengan agenda nasional yang disebut dengan Program Nawacita yang di jabarkan dalam RPJMN yang berlaku saat ini.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tujuan Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Produktifitas sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

2. Meningkatnya Wira Usaha Baru
3. Meningkatnya Kualitas Sektor Perdagangan
4. Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik (nilai sakiP)

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun untuk menyelenggarakan tugas pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan Bupati di bidang Perdagangan Koperasi UKM berdasarkan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Perumusan program kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM;
- c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Pengendalian seluruh kegiatan dibidang Perdagangan Koperasi UKM sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;
- f. Pengoorganisasian, Fasilitasi dan pembinaan di bidang Perdagangan Koperasi UKM
- g. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan / atau perizinan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;
- h. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan kegiatan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Dinas Perdagangan Koperasi UKM;

3.3. Rencana Program dan Kegiatan 2022

Program dan kegiatan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2022 disusun berdasarkan pada tupoksi Dinas

Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mengelola anggaran sebesar Rp. 35.534.670.135,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 21.790.375.885,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 13.744.294.250,-. Adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan tersebut adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran ini.

- I Program : **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- Kegiatan : **1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sub Kegiatan : a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
e. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
b. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 5. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Mebel
 - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II Program** **PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**
- Kegiatan** 8. **Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - Sub Kegiatan** a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 9. **Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- III Program** **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**
- Kegiatan** 10. **Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**
 - Sub Kegiatan** a. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

		b.	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
IV	Program		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
	Kegiatan	11.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Sub Kegiatan	a.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
V	Program		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
	Kegiatan	12.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan	a.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
VI	Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
	Kegiatan	13.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan	a.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi
VII	Program		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
	Kegiatan	14	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
	Sub Kegiatan	a.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		b.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
		c.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		d.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
		e.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
VIII	Program		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
	Kegiatan	15.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi

		Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
	Sub Kegiatan	a. Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
IX	Program	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
	Kegiatan	16. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
	Sub Kegiatan	a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
		17. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
		a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan b. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
X	Program	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
	Kegiatan	18. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
	Sub Kegiatan	a. Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat b. Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat
		19. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
		a. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
		20. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi b. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
XI	Program	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
	Kegiatan	21 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- | | |
|--------------|--|
| Sub Kegiatan | <ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota b. Pameran Dagang Nasional c. Pameran Dagang Lokal d. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan e. Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor |
| XII | <p>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</p> <p>22. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang b. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal |
| XIII | <p>PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI</p> <p>23. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota b. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2023

Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran visi, misi dan arah pembangunan daerah kabupaten Sukoharjo yang merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistematis yang didasarkan pada kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah harus mampu merespon dan bersinergi terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah kabupaten Sukoharjo.

Perumusan kebijakan dan pelaksanaannya serta pemilahan dan pemilihan prioritas yang tajam dan terpercaya merupakan sarana untuk mengejawantahkan apa yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 - 2026.

Sejalan dengan otonomi dan desentralisasi bagi pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dalam pengelolaan keuangan daerah menuntut untuk dilakukan pengelolaan yang berorientasi pada kepentingan public (public oriented). Hal ini tidak hanya terlihat dari besarnya porsi alokasi namun juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Kapasitas dan efektivitas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran dirasakan perlu dioptimalkan. Karena pada umumnya unit kerja belum menjalankan fungsi dan peran secara optimal dan efisien. Terjadinya penganggaran belanja yang kurang tepat merupakan fenomena umum yang digunakan dalam penentuan alokasi dana dengan pendekatan incrementalisme atau line-item budget (trend atau pos anggaran yang tersedia) yang sebetulnya pos tersebut secara riil tidak dibutuhkan.

Oleh karena itu perlu adanya analisis secara akurat tentang alokasi anggaran bagi masing-masing Perangkat Daerah, dimana setiap kegiatan pengalokasian dana (belanja) yang harus berbasis kinerja (capaian), biarpun belum sepenuhnya secara komprehensif dan representative. Kita lakukan hal tersebut dikarenakan secara ideal membutuhkan adanya variable/indikator yang dapat mewakili semua bidang pembangunan. Indikator/variabel yang dibutuhkan antara lain: Indeks pembangunan (ekonomi/sosial) sesuai dengan aktivitas masing-masing Perangkat Daerah, kondisi pembangunan, efektivitas terhadap capaian hasil Ranja Perangkat Daerah, tingkat output yang dihasilkan Perangkat Daerah, anggaran belanja tahun sebelumnya, indeks belanja publik dan belanja aparatur.

Penerapan atau implementasi anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh dan optimal juga diperlukan kesepahaman pola pikir, membangun komitmen yang sinergis dari segenap unsur eksekutif, legislatif dan stakeholder pembangunan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Renja DisdagkopUKM Kabupaten Sukoharjo

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tujuan Meningkatkan Peran Koperasi dan UMKM dalam perekonomian daerah dan Meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Daerah;
2. Meningkatnya nilai ekspor non migas
3. Menurunnya peredaran barang dan jasa yang tidak sesuai standart
4. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Adapun untuk menyelenggarakan tugas pembantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang perdagangan, koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengendalian seluruh kegiatan dibidang Perdagangan Koperasi UKM sesuai kebijakan yang ditetapkan Bupati;
- b. Pembinaan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;
- c. Pengoorganisasian, Fasilitasi dan pembinaan di bidang Perdagangan Koperasi UKM
- d. Pelaksanaan pemberian rekomendasi dan / atau perizinan di bidang Perdagangan Koperasi UKM;
- e. Perumusan kebijakan Bupati di bidang Perdagangan Koperasi UKM berdasarkan wewenang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Perumusan program kerja di lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi UKM;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan kegiatan yang dirancang Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Program Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);

7. Program Pengembangan UMKM

b. Program Pemerintahan Bidang Perdagangan :

1. Program Perizinan Dan Pendaftaran Usaha
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Program Pengembangan Ekspor;
5. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
6. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

c. Program Penunjang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Adapun rincian program,kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel sebagai berikut dan lampiran 3.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 1 tahun serta memuat kebijakan (kerangka regulasi), program (kerangka kegiatan), dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan berpedoman Renstra PD dan mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023. Kedudukan Renja PD menjadi tak terpisahkan dari RKPD, merupakan rujukan untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD dan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS).


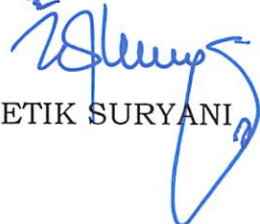
Keberhasilan pelaksanaan dokumen ini, disamping sangat tergantung pada kesiapan dan kemampuan semua komponen masyarakat, baik eksekutif, legislatif, dunia usaha, kelompok kepentingan, maupun kelompok masyarakat lainnya, juga sangat ditentukan oleh sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan, kejujuran dan disiplin dari setiap pelaku pembangunan.

Faktor-faktor ini dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan pembangunan yang mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta koordinasi yang makin mantap sehingga hasil pembangunan menjadi optimal. Pasal 28 dan 29 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Untuk pemerintahan daerah, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah. Demikian juga halnya dengan evaluasi pembangunan daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023, semoga dengan adanya penjabaran Rencana Kerja ini dapat menjadi

gambaran dalam menjalankan Program dan Kegiatan di tahun anggaran 2023.

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI



DATA DUKUNG I

DATA LKPJ AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021 BUPATI SUKOHARJO

Data Dukung 1

OPD Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sukoharjo
 URUSAN Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 TOTAL BELANJA TA 2021 : 32.678.941.000
 REALISASI BELANJA TA 2021 : 21.060.906.207
 PERSENTASE 64,45 %

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rupiah	12.109.137.000	11.042.769.215	91,19%			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rupiah	45.000.000	43.519.000	96,71%			5
	a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
	- Dana	Rupiah	25.000.000	23.519.000	94,08%			
	- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	2	2	100,00%			
	b Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
	- Dana	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100,00%			
	- Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD yang disusun	Dokumen	2	2	100,00%			
	c Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
	- Dana	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100,00%			
	- Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD yang disusun	Dokumen	2	2	100,00%			
	d Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
- Dana	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100,00%				
- Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	2	2	100,00%				
e Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
- Dana	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100,00%				
- Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	3	100,00%				

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rupiah	9.175.187.000	8.521.265.350	92,87%			6
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
-	Dana	Rupiah	8.705.447.000	8.054.543.350	92,52%			
-	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan pegawai		95	95	100,00%			
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD							
-	Dana	Rupiah	449.740.000	446.947.000	99,38%			
-	Jumlah Honorarium Pengelola Keuangan	orang	37	37	100,00%			
c	koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD							
-	Dana	Rupiah	5.000.000	4.925.000	98,50%			
-	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	Laporan	1	1	100,00%			
d	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
-	Dana	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100,00%			
-	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	1	100,00%			
e	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD							
-	Dana	Rupiah	5.000.000	4.850.000	97,00%			
-	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	Laporan	14	14	100,00%			
f	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran							
-	Dana	Rupiah	5.000.000	5.000.000	100,00%			
-	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan	2	2	100,00%			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rupiah	175.350.000	76.500.000	43,63%			3
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya							
-	Dana	Rupiah	95.350.000	1.000.000	1,05%	Keterbatasan penyedia karena spesifikasi barang yang ditetapkan sesuai ketentuan	Menganggarkan kembali dengan spesifikasi yang sesuai ketentuan	
-	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	stel	138	1	0,72%			
b	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
-	Dana	Rupiah	70.000.000	66.250.000	94,64%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
	Jumlah Sosialisasi Administrasi Kepegawaian yang diadakan	kali	10	10	100,00%			
	c Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan							
	- Dana	Rupiah	10.000.000	9.250.000	92,50%			
	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis	orang	25	25	100,00%			
	- Implementasi Peraturan Perundang-undangan							
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rupiah	454.000.000	453.583.850	99,91%			5
	a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
	- Dana	Rupiah	15.000.000	14.854.350	99,03%			
	- Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	jenis	15	15	100,00%			
	b Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
	- Dana	Rupiah	290.000.000	289.885.000	99,96%			
	- Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	jenis	39	39	100,00%			
	c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
	- Dana	Rupiah	45.000.000	45.000.000	100,00%			
	- Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	jenis	14	14	100,00%			
	d Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							
	- Dana	Rupiah	4.000.000	3.960.000	99,00%			
	- Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	bulan	12	12	100,00%			
	e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
	- Dana	Rupiah	100.000.000	99.884.500	99,88%			
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kali	142	142	100,00%			
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rupiah	182.500.000	178.675.000	97,90%			1
	a Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	- Dana	Rupiah	182.500.000	178.675.000	97,90%			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Unit	22	22	100,00%			
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rupiah	1.632.100.000	1.327.260.270	81,32%			3

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
	a Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
	- Dana	Rupiah	10.000.000	9.650.000	96,50%			
	- Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	lembar	651	651	100,00%			
	b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
	- Dana	Rupiah	1.065.600.000	811.739.780	76,18%			
	- Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	kali	12	12	100,00%			
	c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
	- Dana	Rupiah	556.500.000	505.870.490	90,90%			
	- Jumlah Jenis alat kebersihan yang disediakan	jenis	27	27	100,00%			
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rupiah	445.000.000	441.965.745	99,32%			3
	a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
	- Dana	Rupiah	225.000.000	223.532.745	99,35%			
	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	Unit	71	71	100,00%			
	b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
	- Dana	Rupiah	15.000.000	14.835.000	98,90%			
	- Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	jenis	4	4	100,00%			
	c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
	- Dana	Rupiah	205.000.000	203.598.000	99,32%			
	- Jumlah Sarpras Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	1	100,00%			
II	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rupiah	90.000.000	72.880.000	80,98%			
8.	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	40.000.000	33.930.000	84,83%			1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
	a Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota							
	- Dana	Rupiah	40.000.000	33.930.000	84,83%			
	- Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi	Koperasi	20	20	100,00%			
9.	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	50.000.000	38.950.000	77,90%			1
	a Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota							
	- Dana	Rupiah	50.000.000	38.950.000	77,90%			
	- Jumlah koperasi yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dan izin pembukaan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	Koperasi	30	30	100,00%			
III	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rupiah	90.000.000	83.336.000	92,60%			
10.	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	90.000.000	83.336.000	92,60%			2
	a Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							
	- Dana	Rupiah	40.000.000	34.462.000	86,16%			
	- Jumlah koperasi yang mengikuti rapat koordinasi pengawasan koperasi yang sehat mandiri dan berakuntabilitas	Koperasi	60	60	100,00%			
	b Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota							
	- Dana	Rupiah	50.000.000	48.874.000	97,75%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
	Jumlah koperasi yang mengikuti rapat - koordinasi pengawasan koperasi yang sehat mandiri dan berakuntabilitas	Koperasi	30	30	100,00%			
IV	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rupiah	70.000.000	70.000.000	100,00%			
11.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	70.000.000	70.000.000	100,00%			
	a Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota							1
	- Dana	Rupiah	70.000.000	70.000.000	100,00%			
	- Jumlah Koperasi yang di nilai kesehatannya dan mendapatkan Pelatihan	Koperasi	120	120	100,00%			
V	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rupiah	475.304.000	403.209.900	84,83%			
	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	%	62	62	100,00%			
12.	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	475.304.000	403.209.900	84,83%			1
	a Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi							
	- Dana	Rupiah	475.304.000	403.209.900	84,83%			
	- Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Koperasi	260	260	100,00%			
VI	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rupiah	335.000.000	235.000.000	70,15%			
13.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	335.000.000	235.000.000	70,15%			1

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
	a Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi							
	- Dana	Rupiah	335.000.000	235.000.000	70,15%	Ketentuan Kaitan Hibah	Verifikasi penerima hibah	
- Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi Informasi Permodalan, Pengembangan Klaster bisnis, Pelatihan Manajemen dan Monev	KUMKM	160	160	100,00%				
VII	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rupiah	180.000.000	167.452.500	93,03%			
14.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rupiah	180.000.000	167.452.500	93,03%			4
	a Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
	- Dana	Rupiah	55.000.000	53.145.000	96,63%			
	- Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan Tenis Kewirausahaan danRakor up date Data UMKM	UMKM	120	120	100,00%			
	b Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro							
	- Dana	Rupiah	80.000.000	79.909.500	99,89%			
	- Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan teknis Kemitraan dan Jaringan	UMKM	30	30	100,00%			
	c Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro							
	- Dana	Rupiah	25.000.000	14.398.000	57,59%	Efisiensi Anggaran	Sesuai kebutuhan	
	- Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan kelembagaan dan pengembangan Usaha Mikro dan kecil	tahun	1	1	100,00%			
	d Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro							
	- Dana	Rupiah	20.000.000	20.000.000	100,00%			
	- Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pelayanan kerjasama antara koperasi dengan lembaga penyedia jasa	KUMKM	40	40	100,00%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
VIII	Program Pengembangan UMKM	Rupiah	112.000.000	111.652.000	99,69%			
15.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi peningkatan skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Rupiah	112.000.000	111.652.000	99,69%			1
	a Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Tehnologi							
	- Dana	Rupiah	112.000.000	111.652.000	99,69%			
	- Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	UMKM	5	5	100,00%			
	URUSAN PEMERITAHAN BIDANG PERDAGANGAN							
IX	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rupiah	17.673.500.000	7.443.180.089	42,11%			
16	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Rupiah	17.488.500.000	7.265.593.339	41,54%			2
	a Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan							
	- Dana	Rupiah	13.578.500.000	3.476.749.300	25,60%			
	- Jumlah Pasar yang dibangun dan dipelihara	Pasar	1	1	100,00%	Pembayaran denda Pasar Ir Soekarno belum terbayarkan karena menunggu proses dari Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Pembayaran denda pasar Ir Soekarno dianggarkan di Tahun Anggaran 2022	
	b Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan							
	- Dana	Rupiah	3.910.000.000	3.788.844.039	96,90%			
	- Target PAD	%	100	100	100,00%			
17	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Rupiah	185.000.000	177.586.750	95,99%			2
	a Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
	- Dana	Rupiah	35.000.000	31.926.750	91,22%			
	- Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	Orang	60	60	100,00%			
	b Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan							
	- Dana	Rupiah	150.000.000	145.660.000	97,11%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
X 18	Jumlah pedagang yang dilakukan Penyuluhan, Penertiban, Penataan, Pendataan Pedagang Pasar dan workshop pengelola Pasar	Pedagang	300	300	100,00%			2
	Program Stabllisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rupiah	80.000.000	74.357.900	92,95%			
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	40.000.000	37.993.000	94,98%			
	a Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
	- Dana	Rupiah	20.000.000	19.760.000	98,80%			
	- Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	Kali	2	2	100,00%			
	b Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat							
	- Dana	Rupiah	20.000.000	18.233.000	91,17%			
	- Jumlah pedagang yang mendapatkan Sosialisasi	Pedagang/orang	50	50	100,00%			
	- Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting							
19	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Rupiah	20.000.000	18.785.000	93,93%			1
	a Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota							
	- Dana	Rupiah	20.000.000	18.785.000	93,93%			
	- Jumlah Pedagang yang mendapatkan Sosialisasi pengendalian harga dan stok barang penting	Pedagang/orang	50	50	100,00%			
20	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	20.000.000	17.579.900	87,90%			1
	a Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi							
	- Dana	Rupiah	20.000.000	17.579.900	87,90%			
	- Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	kali	2	2	100,00%			
XI	Program Pengembangan Ekspor	Rupiah	175.000.000	160.856.000	91,92%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
21	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rupiah	175.000.000	160.856.000	91,92%			4
	a Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota							
	- Dana	Rupiah	40.000.000	33.895.000	84,74%			
	- Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	Pelaku usaha/orang	60	60	100,00%			
	b Pameran Dagang Nasional							
	- Dana	Rupiah	0	0	-			
	- Jumlah Gelar Potensi Daerah Tingkat Nasional Kabupaten Sukoharjo	-	-	-	-			
	c Pameran Dagang Lokal							
	- Dana	Rupiah	40.000.000	39.225.000	98,06%			
	- Jumlah Keikutsertaan Pameran Dagang regional	Kali	2	2	100,00%			
	d Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan							
	- Dana	Rupiah	80.000.000	74.176.000	92,72%			
	- Jumlah Keikutsertaannya Pameran Dagang regional	Kali	1	1	100,00%			
	e Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor							
	- Dana	Rupiah	15.000.000	13.560.000	90,40%			
	- Jumlah Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	Pelaku Usaha	30	30	100,00%			
XII	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rupiah	115.000.000	110.306.356	95,92%			
22	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Rupiah	115.000.000	110.306.356	95,92%			2
	a Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang							
	- Dana	Rupiah	100.000.000	95.306.356	95,31%			
	- Jumlah Tera dan Tera Ulang	Tempat Usaha	43	43	100,00%			

NO	PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	PERMASALAHAN	SOLUSI	JUMLAH SUB KEGIATAN
	b Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal							
	- Dana	Rupiah	15.000.000	15.000.000	100,00%			
	- Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi metrologi legal	Pelaku Usaha	50	50	100,00%			
XIII	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rupiah	1.174.000.000	1.085.906.247	92,50%			
23	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Rupiah	1.174.000.000	1.085.906.247	92,50%			2
	a Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota							
	- Dana	Rupiah	1.154.000.000	1.066.916.247	92,45%			
	- Tertatanya tempat berusaha bagi pedagang dan terpeliharanya gedung	Bulan	12	12	100,00%			
	b Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan							
	- Dana	Rupiah	20.000.000	18.990.000	94,95%			
	- Jumlah Kecamatan penyediaan Informasi Perkembangan Harga	Kecamatan	12	12	100,00%			
								54

Sukoharjo, Januari 2022
**KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN SUKOHARJO**



IWAN SETIYONO, S.STP, M.Si
Perbina Tingkat I
NIP. 19780304 199703 1 001

DATA DUKUNG II

DATA DUKUNG II

**DISDAGKOP UKM
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)						
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.158.360.456		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.000.000		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000	SEKRET	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD yang disusun	2 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD yang disusun	2 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.422.354.000		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.988.654.000	SEKRET	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 orang	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	413.700.000	SEKRET	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	75 Dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	1 laporan	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	14 laporan	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									3	4	5	6	7	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	08						
									Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	170.000.000		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000	SEKRET	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Administrasi Kepegawaian	100 orang	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	2 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160.000.000	SEKRET	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25 pegawai	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.000.000		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	SEKRET	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	15 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	290.000.000	SEKRET	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	42 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	45.000.000	SEKRET	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	14 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	SEKRET	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	95.000.000	SEKRET	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 kali	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	35.000.000		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	20.000.000	SEKRET	Jumlah Mebel yang diadakan	40 unit	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	SEKRET	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	51 unit	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.792.006.456		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	SEKRET	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	651 lembar	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.065.600.000	SEKRET	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	33 rekening	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN										APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER
1										3	4	5	6	7
2										3	4	5	6	7
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	716.406.456	SEKRET	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	32 orang	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.000.000		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	225.000.000	SEKRET	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/ difasilitasi	71 unit	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	SEKRET	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	APBD
2									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	180.000.000		Persentase Permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000		Cakupan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi	30 Koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000		Cakupan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dan izin pembukaan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	475 koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	119.000.000		Persentase Koperasi aktif	82.5%	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1								2	3	4	5	6	7
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	119.000.000		Cakupan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	69.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mengikuti rapat koordinasi pengawasan koperasi yang sehat mandiri dan berakuntabilitas	120 koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	50.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penerapan kepatuhan, kelembagaan dan laporan perkembangan koperasi	25 koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	42.000.000		Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	14%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	42.000.000		Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	42.000.000	P. KOPERASI	Jumlah Koperasi yang di nilai kesehatannya dan mendapatkan Pelatihan	45 Koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	05		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	423.600.000		Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	65%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	423.600.000		Cakupan peningkatan pengetahuan dan pemahaman SDM koperasi dan UMKM	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	423.600.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	686 koperasi	APBD dan DAK Non Fisik
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	06		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	220.000.000		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	4%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	220.000.000		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	220.000.000	P.KOPERASI	Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi Informasi Permodalan, Pengembangan Klaster bisnis, Pelatihan Manajemen dan Monev	45 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	465.000.000		Persentase Fasilitasi Peningkatan Perizinan bagi UMKM	26%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	465.000.000		Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	175.000.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan Tenis Kewirausahaan dan Rakor up date Data UMKM	480 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	190.000.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan teknis Kemitraan dan Jaringan	150 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.000.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi HKI (Hak Merk)	30 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	25.000.000	P.KOPERASI	Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan kelembagaan dan pengembangan Usaha Mikro dan kecil	1 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	55.000.000	P.KOPERASI	Jumlah KUMKM yang mendapatkan Pelayanan kerjasama antara koperasi dengan lembaga penyedia jasa	40 KUMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	473.500.000		Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	26%	

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	473.500.000		Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	473.500.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	35 UMKM	APBD
3									URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	19.592.165.935		Persentase Pasar Rakyat yang baik	84,6%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	19.407.165.935		Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	15.399.665.000	PASAR	Jumlah Pasar yang dibangun dan dipelihara	3 pasar	APBD dan Bankeu Provinsi
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4.007.500.935	PASAR	Target PAD	100%	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	185.000.000		Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	35.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	120 pedagang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.02	02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	PASAR	Jumlah pedagang yang dilakukan Penyuluhan, Penertiban, Penataan, Pendataan Pedagang Pasar dan workshop pengelola Pasar	600 pedagang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	262.000.000		Persentase Pengendalian Harga	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	196.000.000		Cakupan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	02	Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	26.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	4 kali	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									3	4	5	6	7	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	170.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah pedagang yang mendapatkan Sosialisasi Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	200 pedagang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	20.000.000		Cakupan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pedagang yang mendapatkan Sosialisasi pengendalian harga dan stok barang penting	100 pedagang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.000.000		Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	20.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pengawasan Legalitas Usaha Toko Swalayan/Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo	2 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.03	02	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	26.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	485.000.000		Persentase Peningkatan Ekspor	0,3%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	485.000.000		Cakupan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	40.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	60 Pelaku Usaha	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	310.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Gelar Potensi Daerah Tingkat Nasional Kabupaten Sukoharjo	1 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	40.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Keikutsertaan Pameran Dagang regional	3 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	80.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Keikutsertaannya Pameran Dagang regional	3 kali	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									3	4	5	6	7	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	15.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	30 pelaku usaha	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	117.284.074		Persentase Pasar Tertib Ukur	23,1%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	117.284.074		Cakupan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	102.284.074	PERDAGANGAN	Jumlah Tera dan Tera Ulang	58 tempat usaha	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	15.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi metrologi legal	50 pelaku usaha	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	996.759.670		Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	10%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	996.759.670		Cakupan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	976.759.670	PERDAGANGAN	Jumlah Gedung Promosi Produk Unggulan Daerah yang beroperasi	1 unit	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	20.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah bulan penyediaan Informasi Perkembangan Harga	12 bulan	APBD
JUMLAH									35.534.670.135					

Sukoharjo, September 2022
 KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
 KABUPATEN SUKOHARJO



IWAN SETIYONO, S.STP, M.Hum
 NIP. 19780304199703 1 001

DATA DUKUNG III

DATA DUKUNG III

**DISDAGKOP UKM
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023**

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)						
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.831.608.456		Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.000.000		Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	SEKRET	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	1 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah Dokumen RKA dan RKAP SKPD yang disusun	2 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah Dokumen DPA dan DPPA SKPD yang disusun	2 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	3 dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.214.102.000		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.727.902.000	SEKRET	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	100 pegawai	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	466.200.000	SEKRET	Jumlah dokumen SPJ yang telah diverifikasi dan disahkan	75 Dokumen	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah laporan realisasi anggaran dan neraca sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi	1 laporan	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	1 laporan	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran	14 laporan	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen pelaporan prognosis realisasi anggaran	2 laporan	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.000.000		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	35.000.000	SEKRET	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi Administrasi Kepegawaian	100 orang	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000	SEKRET	Jumlah dokumen Movev dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	2 dokumen	APBD
2	17	2-7	3-30	0-0	0-3	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	SEKRET	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	50 pegawai	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000	SEKRET	Jumlah ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	25 orang	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	508.500.000		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	SEKRET	Jumlah jenis komponen listrik yang disediakan	15 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000	SEKRET	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	42 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45.000.000	SEKRET	Jumlah jenis barang yang dicetak dan digandakan	14 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.000.000	SEKRET	Jumlah jenis bahan bacaan yang disediakan	2 jenis	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144.500.000	SEKRET	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	142 kali	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.000.000		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	SEKRET			
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	0	SEKRET	Jumlah Mebel yang diadakan	0	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000	SEKRET	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	12 unit	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.644.006.456		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	SEKRET	Pengelolaan Surat Masuk dan Keluar	651 surat	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	948.600.000	SEKRET	Jumlah Rekening jasa sumber daya yang dibayar tiap bulan	33 rekening	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	685.406.456	SEKRET	Jumlah SDM Pelayanan Umum yang disediakan	28 orang	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260.000.000		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	235.000.000	SEKRET	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara/difasilitasi	71 unit	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000	SEKRET	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0				
2									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	165.000.000		Persentase Permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas Simpan Pinjam untuk USP/KSP	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000		Cakupan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mendapatkan pelatihan dan sosialisasi	50 Koperasi	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER		
1								2	3	4	5	6	7	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		Cakupan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi	100%		
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mendapatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah dan izin pembukaan Pembukaan Kantor Cabang Koperasi	125 koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	122.000.000		Persentase Koperasi aktif	83%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	122.000.000		Cakupan pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	40.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mengikuti rapat koordinasi pengawasan koperasi yang sehat mandiri dan berakuntabilitas	120 koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	82.000.000	KELEMBAGAAN	Jumlah Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan penerapan kepatuhan, kelembagaan dan laporan perkembangan koperasi	50 koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	40.000.000		Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang dinilai kesehatannya	18%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000		Cakupan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	P. KOPERASI	Jumlah Koperasi yang di nilai kesehatannya dan mendapatkan Pelatihan	50 Koperasi	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									3	4	5	6	7	
2									3	4	5	6	7	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	4	2.01	02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	P. KOPERASI	Jumlah Koperasi yang mendapat penghargaan	17 koperasi	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	420.600.000		Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	70%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	420.600.000		Cakupan peningkatan pengetahuan dan pemahaman SDM koperasi dan UMKM	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	420.600.000	KELEMBAGAAN	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	240 koperasi	APBD dan DAK Non Fisik
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	165.000.000		Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi	4,50%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	165.000.000		Cakupan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	165.000.000	P.KOPERASI	Jumlah KUMKM yang mendapatkan sosialisasi Informasi Permodalan, Pengembangan Klaster bisnis, Pelatihan Manajemen dan Monev	47 KUMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	718.500.000		Persentase Fasilitas Peningkatan Perizinan bagi UMKM	27%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	718.500.000		Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	175.000.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan Tenis Kewirausahaan dan Rakor up date Data UMKM	480 UMKM	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	30.000.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan teknis Kemitraan dan Jaringan	150 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	263.500.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan Bimbingan Teknis dan Fasilitasi HKI (Hak Merk)	30 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	220.000.000	P.KOPERASI	Jumlah UMKM yang mendapatkan pendampingan kelembagaan dan pengembangan Usaha Mikro dan kecil	1 UMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	30.000.000	P.KOPERASI	Jumlah KMUKM yang mendapatkan Pelayanan kerjasama antara koperasi dengan lembaga penyedia jasa	40 KUMKM	APBD
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100.000.000		Persentase Peningkatan Omset Produk UMKM	27%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100.000.000		Cakupan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100%	
2	17	2-17	3-30	0-0	0-3	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.000.000	UMKM	Jumlah UMKM yang mengikuti Pameran	35 UMKM	APBD
3									URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3	30								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	11.000.000		Persentase permohonan izin usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	11.000.000		Cakupan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	11.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah jenis penerbitan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan	1 jenis	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN								APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1								2	3	4	5	6	7
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	17.057.165.935		Persentase Pasar Rakyat yang baik	88,4%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	16.807.165.935		Cakupan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	12.899.665.000	PASAR	Jumlah Pasar yang dibangun dan dipelihara	1 pasar	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.01	02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.907.500.935	PASAR	Target PAD	100%	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	250.000.000		Cakupan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.02	01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang dibina	120 pedagang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	03	2.02	02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100.000.000	PASAR	Jumlah pedagang yang dilakukan Penyuluhan, Penertiban, Penataan, Pendataan Pedagang Pasar dan workshop pengelola Pasar	700 Pedagang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	90.000.000		Persentase Pengendalian Harga	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	20.000.000		Cakupan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	02 Koordinasi dan sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	20.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pengawasan Peredaran barang dan Jasa	4 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.01	03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	0	PERDAGANGAN	Jumlah pedagang yang mendapatkan Sosialisasi Pengendalian Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	200 pedagang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	20.000.000		Cakupan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									3	4	5	6	7	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pedagang yang mendapatkan Sosialisasi pengendalian harga dan stok barang penting	100 orang	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Cakupan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.03	01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pengawasan Legalitas Usaha Toko Swalayan/Toko Modern di Kabupaten Sukoharjo	2 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	04	2.03	02	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	25.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	4 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	470.000.000		Persentase Peningkatan Ekspor	0,35%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	470.000.000		Cakupan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	30.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan	60 pelaku usaha	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	310.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Gelar Potensi Daerah Tingkat Nasional Kabupaten Sukoharjo	1 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	40.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Keikutsertaan Pameran Dagang regional	3 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	04	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	75.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Keikutsertaannya Pameran Dagang regional	3 kali	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	05	2.01	06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	15.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah Terbinanya Pelaku Usaha Ekspor	30 pelaku usaha	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	117.284.074		Persentase Pasar Tertib Ukur	30,7%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	117.284.074		Cakupan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	102.284.074	PERDAGANGAN	Jumlah Tera dan Tera Ulang	58 tempat usaha	APBD

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN									APBD	BIDANG	KELUARAN	SATUAN	KETR. SUMBER	
1									2	3	4	5	6	7
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	06	2.01	02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	15.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sosialisasi metrologi legal	50 pelaku usaha	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	996.759.670		Persentase Hasil Transaksi Dalam Pameran	10%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	996.759.670		Cakupan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Di Tingkat Kabupaten/Kota	976.759.670	PERDAGANGAN	Jumlah Gedung Promosi Produk Unggulan Daerah yang beroperasi	1 unit	APBD
3	30	2-17	3-30	0-0	0-3	07	2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	20.000.000	PERDAGANGAN	Jumlah bulan penyediaan Informasi Perkembangan Harga	12 bulan	APBD
JUMLAH									33.304.918.135					

Sukoharjo, Juni 2022
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN SUKOHARJO

